



Nilai Pendidikan Interaksi Multikulturalisme dalam Perwujudan Humanisme di Era Khalifah Bani Abbasiyah

Umi Muti'ah Putri¹, Haidar Putra Daulay², Solihah Titin Sumanti³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author: ✉ mutiah0331244042@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan interaksi multikultural sebagai manifestasi nilai-nilai humanisme yang berkembang pada era kekhalifahan Bani Abbasiyah, terutama dalam bidang pendidikan. Sebagai salah satu sejarah keemasan peradaban Islam, periode ini dikenal dengan keberagaman budaya, agama dan etnis yang hidup berdampingan secara harmonis. Fokus pada penelitian ini adalah mengkaji pola kebijakan yang diterapkan oleh khalifah Abbasiyah sehingga terwujudnya interaksi multikultural dan nilai humanisme yang terbangun pada masa Abbasiyah dari berbagai aspek kehidupan, seperti sistem pemerintahan, politik, intelektual, ekonomi, militer dan sosial serta kemajuan peradaban Bani Abbasiyah atas hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif historis dengan jenis pendekatan studi kepustakaan. Data di peroleh dari berbagai sumber sejarah seperti teks keagamaan dan literatur ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masa kekhalifahan Bani Abbasiyah menjadi model integrasi multikultural yang berhasil dibangun. Melalui kebijakan pemerintah yang inklusif dengan mendukung berbagai interaksi dialog lintas budaya, transfer ilmu pengetahuan dan toleransi menjadi kunci utama dalam perwujudannya. Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya interaksi multikultural dalam membangun peradaban yang maju dan harmonis serta relevan diterapkan dalam konteks multikulturalisme masa kini.

ARTICLE INFO

Article history:

Received

10 November 2024

Revised

21 December 2024

Accepted

10 January 2025

Key Word

Interaksi Multikultural, Humanisme, Bani Abbasiyah.

How to cite

<https://pusdikra-publishing.com/index.php/jsr>



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Era kekhalifahan Bani Abbasiyah (750-1258 M) merupakan salah satu periode paling gemilang dalam sejarah peradaban Islam. Dalam kurun waktu tersebut, dunia Islam tidak hanya mengalami perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan ekonomi, tetapi juga menjadi pusat interaksi multikultural yang mencerminkan semangat humanisme universal. Sebagai sebuah kekhalifahan yang wilayahnya mencakup beragam kelompok etnis, agama, dan budaya, Bani Abbasiyah berhasil menciptakan ruang bagi pertukaran ide dan nilai di antara berbagai peradaban yang

ada di bawah kekuasaannya. Hal ini menjadikan Bani Abbasiyah sebagai simbol peradaban yang inklusif dan toleran.

Konsep multikulturalisme dalam Islam berakar pada prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap keberagaman. Ajaran Islam menekankan bahwa seluruh umat manusia berasal dari sumber yang sama dan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Tuhan. Prinsip ini menjadi dasar bagi terwujudnya harmoni sosial di tengah masyarakat yang plural. Pada masa Bani Abbasiyah, nilai-nilai ini diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan inklusif yang mendorong partisipasi berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya dalam pembangunan peradaban.

Fenomena interaksi multikultural di era ini tidak terlepas dari kebijakan politik dan sosial yang di terapkan oleh para khalifah Bani Abbasiyah. Mereka mendukung penerimaan terhadap keragaman budaya melalui patronase terhadap para ilmuwan, sastrawan, dan filsuf dari berbagai latar belakang. Kota Baghdad yang didirikan sebagai ibu kota pemerintahan pada tahun 762 M menjadi pusat kosmopolitan yang menarik perhatian intelektual dari berbagai penjuru dunia, termasuk Persia, Yunani, India, Cina dan lainnya. Di kota inilah muncul institusi seperti Bait Al-Hikmah yang menjadi simbol kolaborasi lintas budaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. (Irfan, 2016).

Namun, keberhasilan interaksi multikultural pada masa Bani Abbasiyah bukan hanya sekadar hasil dari kebijakan formal pemerintah, tetapi juga didorong oleh nilai-nilai humanisme yang terkandung dalam ajaran Islam. Nilai-nilai tersebut menekankan pentingnya penghormatan terhadap keberagaman dan pencarian ilmu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt. dalam konteks ini, interaksi multikultural tidak hanya berfungsi untuk memperkaya kebudayaan, tetapi juga menjadi manifestasi dari prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal.

Kajian penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dinamika interaksi multikultural pada era kekhalifahan Bani Abbasiyah sebagai wujud humanisme pada berbagai aspek. Peneliti ini tidak hanya akan mengungkapkan bagaimana berbagai kelompok budaya dan agama berinteraksi, tetapi juga akan menganalisis kontribusi dari interaksi tersebut terhadap perkembangan peradaban global. Dengan meninjau aspek-aspek historis, sosial, dan intelektual, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana semangat humanisme mampu melampaui batas-batas geografis dan kultural dalam membangun peradaban yang inklusif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang pada umumnya bertujuan untuk memberikan penjelasan dan uraian mendalam terhadap suatu hal. Metode ini menekankan analisis dari proses berpikir secara deduktif dan

induktif serta pengamatan terhadap sebuah fenomena dengan lebih meneliti substansi makna dari hal tersebut. (Suparno, 2014: 2). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yakni kualitatif historis, yaitu kajian yang akan dijadikan objek berupa sejarah atau fakta-fakta mengenai fenomena yang telah terjadi di masa lampau dan dibahas orang lain mengenai segala ihwal nya. Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini ialah untuk mengetahui sebuah fakta sejarah mengenai interaksi multikultural sebagai wujud nilai-nilai humanisme pada masa Daulah Bani Abbasiyah dan konteks relevannya pada konteks kekinian. Oleh karena itu data utama dalam penelitian ini berupa dokumentasi baik suara, gambar digital, dan buku-buku sejarah atau karya ilmiah pendukung lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Multikulturalisme dan Humanisme Dalam Perspektif Islam

Islam sebagai sebuah ajaran agama dan peradaban memiliki landasan kuat untuk mengembangkan konsep multikulturalisme dan humanisme. Kedua konsep ini bersumber dari nilai-nilai universal yang tertanam dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw. yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dan keragaman budaya sebagai bagian dari tanda kebesaran Allah Swt.

Kedua konsep ini tidak hanya menjadi bagian integral dari nilai-nilai Islam, tetapi juga relevan untuk diterapkan dalam konteks dunia modern. Humanisme Islam memberikan landasan etis untuk memperjuangkan keadilan sosial, hak asasi manusia dan solidaritas universal. Sementara itu, multikulturalisme Islam mengajarkan pentingnya dialog lintas budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif.

Dalam kehidupan masyarakat Islam, nilai-nilai multikultural dapat berkembang secara dinamis. Nilai multikultural yang ada dalam kehidupan bukanlah suatu hal yang tiba-tiba ada, namun nilai multikultural yang "diperjuangkan" oleh individu yang ada dalam masyarakat g berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam kehidupan masyarakat, multikulturalisme mempunyai cita-cita luhur yakni kehidupan harmonis dalam masyarakat yang berbeda-beda. Adanya konflik di tengah masyarakat sering menyeruak sebagai akibat dari rendahnya kesadaran untuk berbagi hidup dalam kebersamaan. Seperti yang disampaikan Amirudin (2019) bahwa dalam konsep multikulturalisme manusia mempunyai peran untuk dapat hidup dalam perbedaan, rasa saling percaya, saling memahami, saling menghargai, berfikir terbuka, apresiasi dan interdependensi, resolusi konflik dan rekonsiliasi tanpa adanya kekerasan.

Multikulturalisme tidak hanya sebatas pengakuan terhadap fakta keragaman budaya. Pada saat yang sama, pengakuan terhadap keragaman menuntut anggota masyarakat berkomitmen untuk bersama-sama hidup berdampingan dalam bingkai

kerukunan dan saling menghormati. Dalam kondisi masyarakat seperti ini, masing-masing anggota masyarakat bersepakat untuk sama-sama bekerja sama bahu-membahu memajukan masyarakatnya bersama-sama tanpa mempermasalahkan perbedaan budaya dan latar belakang lain, karena masalah perbedaan budaya telah dianggap selesai. (Saifuddin, 2021).

Kebijakan Bani Abbasiyah dalam Implementasi Nilai Pendidikan Multikultural dan Humanisme

Kekhalifahan Bani Abbasiyah yang berdiri dari tahun 750 hingga 1258 M, dikenal sebagai salah satu era paling gemilang dalam sejarah peradaban Islam. Masa ini ditandai dengan berbagai kebijakan yang tidak hanya mendorong kemajuan ilmu pengetahuan saja tetapi juga memupuk interaksi multikultural dan nilai-nilai humanisme. Para khalifah Bani Abbasiyah, terutama Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan terbuka bagi berbagai budaya, agama, dan etnis. Berikut adalah beberapa kebijakan yang mencerminkan hal tersebut, yaitu :

1. Keterbukaan terhadap berbagai budaya

Para khalifah Abbasiyah terutama Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun menunjukkan keterbukaan terhadap budaya non-Arab (mawali). Mereka mendorong penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban besar seperti Persia, Romawi, India dan lainnya sehingga multikulturalisme berkembang melampaui batasan masyarakat Arab asli.

2. Kebijakan non-diskriminatif

Kekhalifahan Bani Abbasiyah menerapkan prinsip persamaan derajat tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Siapa pun yang berkompeten tanpa memandang latar belakang etnis atau agama dapat berpartisipasi dalam sistem pemerintahan. Hal ini menciptakan suasana persaudaraan dan kolaborasi di antara berbagai komunitas. (Hasanah & Heni Verawati, 2022).

3. Promosi seni dan akulturasi budaya

Pada masa Bani Abbasiyah terjadi akulturasi budaya yang tercermin dalam seni dan arsitektur dengan memadukan elemen-elemen dari berbagai budaya. Contohnya adalah pembangunan masjid, istana dan perpustakaan yang mencerminkan perpaduan gaya arsitektur Persia, Bizantium, dan India. (Fransisca, et.al, 2024).

4. Pembangunan infrastruktur bagi kesejahteraan umum

Selain mendukung pendidikan dan budaya, kekhalifahan Bani Abbasiyah juga membangun infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, perpustakaan dan fasilitas publik yang terbuka untuk semua kalangan. Layanan fasilitas ini tidak hanya diperuntukan bagi umat Islam saja tetapi juga bagi mereka yang berasal dari

agama dan etnis lain, hal ini mencerminkan nilai-nilai humanisme yang menempatkan kesejahteraan manusia di atas segalanya

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh para khalifah Bani Abbasiyah mencerminkan komitmen mereka terhadap interaksi multikultural dan nilai-nilai humanisme. Maka tidak heran jika pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah sering disebut sebagai "*The Golden Age*" di mana berbagai budaya dan tradisi dapat bersinergi menciptakan peradaban yang maju dan penuh kedamaian.

Interaksi Pendidikan Multikultural Dalam Berbagai Aspek Kehidupan di Era Bani Abbasiyah

1. Sistem pemerintahan

Berbagai sistem Islam maupun non-Islam yang telah diterapkan oleh kepemimpinan yang sebelumnya (Bani Umayyah) menjadi landasan bagi berlangsungnya pemerintahan Dinasti Abbasiyah. (Aziz & Siti Fatimah, 2018). Bila dibandingkan dengan birokrasi Bani Umayyah, tampaknya tidak banyak perubahan yang berarti dalam hal struktur pemerintahan Bani Abbasiyah ini. Barang kali beberapa aspek perbedaan hanya bisa ditemukan dalam aspek-aspek tertentu, antara lain:

- a. Penambahan dewan perlindungan kaum Mawali dan Zimmi, dewan perlindungan kaum tertindas dan dewan pekerjaan umum.
- b. Semakin lengkapnya peraturan-peraturan di semua bidang termasuk dalam urusan pertanian dan perdagangan. Kemajuan administrasi pemerintahan Bani Abbasiyah ini adalah hasil politik de-Arabisasi, sehingga konvergensi dari berbagai kultur mampu menjembatani kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan negara serta rakyat. (Nasution, 2013).

Salah satu ciri menonjol pada pemerintahan Bani Abbasiyah adalah politik de-Arabisasi, yaitu kebijakan yang mengurangi dominasi budaya Arab dalam pemerintahan dan memberi ruang bagi berbagai budaya non-Arab untuk turut berkontribusi. Kebijakan ini mencerminkan nilai multikulturalisme karena memungkinkan konvergensi berbagai tradisi, nilai dan pandangan dunia dari kelompok yang beragam.

Pembentukan dewan khusus untuk melindungi kaum mawali dan zimmi menunjukkan pengakuan terhadap keberagaman masyarakat pada Daulah Bani Abbasiyah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah menganggap penting keberadaan semua kelompok masyarakat terlepas dari latar belakang agama atau etnis mereka. Pengakuan ini juga menjadi upaya untuk menciptakan harmoni sosial dan menghindari diskriminasi berdasarkan identitas kelompok.

Kebijakan dan struktur pemerintahan Bani Abbasiyah menunjukkan nilai-nilai multikulturalisme dan humanisme yang mendalam. Politik de-Arabisasi memungkinkan integrasi budaya yang beragam, menciptakan pemerintahan yang inklusif dan adaptif terhadap perlindungan bagi berbagai etnis kaum yang

mencerminkan komitmen kekhalifahan Bani Abbasiyah terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Ilmu pengetahuan

Kota Baghdad menjadi lebih masyhur lagi karena perannya sebagai pusat perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam, sehingga banyak para ilmuwan dari berbagai penjuru datang ke kota ini untuk mendalami ilmu pengetahuan. (Nasution, 2013). Seorang sejarawan, yaitu Philip K. Hitti menyebut kota ini sebagai kota intelektual. (Sumanti, 2024).

Masa kejayaan pendidikan Islam di mulai dengan berkembang pesatnya berbagai lembaga pendidikan dan madrasah. Kebudayaan Islam pada masa ini tidak hanya mendatangkan kesejahteraan bagi kaum Muslim saja, tetapi juga mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia pada umumnya. (Kodir, 2014).

Kekhalifahan Bani Abbasiyah dengan semangatnya terhadap toleransi intelektual menerima baik kehadiran para bangsa Eropa di Baghdad. Para khalifah dan ilmuwan Muslim melihat pengetahuan sebagai warisan universal yang tidak mengenal batas agama atau etnis. Oleh karena itu, interaksi antara ilmuwan Muslim dan Eropa berlangsung dalam suasana kolaboratif. Bangsa Eropa tidak hanya belajar, tetapi juga membawa ilmu pengetahuan ini ke benua mereka yang kelak menjadi fondasi penting bagi era renaisans di Eropa.

Keterbukaan para khalifah Bani Abbasiyah bagi bangsa Eropa ataupun kaum Mawali tercermin pada gerakan intelektual berikut ini:

a. Gerakan penerjemahan

Pada masa Abasiyyah ilmu pengetahuan telah banyak mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat, hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran khalifah yang mendukung kemajuan itu. Faktor yang paling menonjol dari perkembangan ini adalah dengan dikembangkannya penterjemahan kitab-kitab non Arab ke dalam bahasa Arab yang telah dirintis oleh khalifah Ja'far al-Mansur. Dengan memperkerjakan para ahli terjemah, di antaranya Fade Naubakt, Abdullah bin Muaqaffa', yang pada akhirnya ilmu-ilmu dari Barat bisa dipahami oleh masyarakat umum. (Hasan, 2001).

Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Makmun para penerjemahan buku-buku asing sangat ditekankan sedemikiannya. Para penerjemah bukan hanya dari kalangan Muslim tapi juga terdiri dari kaum Nasrani, Yahudi dan Majusi yang diberikan upah yang tinggi oleh khalifah. Terdapat empat orang penterjemah yang terkemuka, yaitu, Hunayn bin Ishaq, Wa'qub bin Ishaq, dari suku arah Kinda, Thabit ibn Qurra dari Harran, dan Umar ibn al-Farrakhan dari Tabaristan. Dewan penterjemahan, yaitu beberapa dari rakyat yang kaya turut melindungi penterjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. (Saufi & Hasmi Fadiillah, 2015).

Meski kegiatan penerjemahan sudah dilakukan sejak masa Daulah Umayyah, upaya besar-besaran untuk menerjemahkan manuskrip-manuskrip berbahasa asing terutama Bahasa Yunani dan Persia kedalam bahasa Arab mengalami bahasa keemasan pada masa Daulah Abbsiyah. Para ilmuan diutus ke daerah Byzantium untuk mencari naskah-naskah Yunani dalam berbagai bidang ilmu terutama filsafat dan kedokteran. Sedangkan perburuan manuskrip di daerah timur seperti Persia adalah terutama dalam bidang tata negara dan sastra. Gerakan penerjemahan ini sangat didukung oleh Khalifah al-Ma'mun yang membayar mahal hasil penerjemahan. Bahkan dia pernah membayar hasil penerjemahan setara bobot emas. Karena keinginannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai *super power* dunia ketika itu.

Selain itu, adanya toleransi membentuk terjadinya asimilasi antara bangsa Arab (Abbasiyah) dengan bangsa lain non-Arab yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Seperti pengaruh bangsa Persia dalam menata sistem pemerintahan dan penguasaan dalam ilmu filsafat dan sastra.

b. Bait al-Hikmah : perpustakaan dan observatorium

Baitul Hikmah merupakan pusat perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Institusi ini merupakan kelanjutan dari institusi serupa di masa Imperium Sasania Persia yang bernama *Jundishapur Academy*. Namun, berbeda dari institusi pada masa Sasania yang hanya menyimpan puisi-puisi dan cerita-cerita untuk raja, pada masa Abbasiyah, institusi ini diperluas penggunaannya. Pada masa Kharun al-Rasyid, institusi ini bernama *Khizanah al-Hikmah* (Khazanah Kebujaksanaan) yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Sejak 518 M, al-Ma'mun mengembangkan lembaga ini dan diubah namanya menjadi *Bait al-Hikmah*. Pada masa ini, Baitul Hikmah dipergunakan secara lebih maju yaitu ssebagai tempat penyimpanan buku-buku kuno yang didapat dari Persia, Bizantium, dan Bahkan Etiopia dan India. Di industry ini, al-Ma'mun memperkerjakan Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi yang ahli di bidang aljabar dan astronomi. Orang-orang Persia juga masih dipekerjakan di Baitul Hikmah ini. Direktur perpustakaan Baitul Hikmah sendiri adalah seorang nasionalis Persia dan ahli Pahlewi, Sahl Ibn Harun. (Zahdi, 2018).

Salah satu aspek yang paling mencolok dari peradaban Bani Abbasiyah adalah toleransi intelektualnya. Hal ini tercermin dalam gerakan penerjemahan yang menjadi tulang punggung pengembangan ilmu pengetahuan di kota Baghdad. Kitab-kitab Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang memungkinkan berbagai budaya saling berkontribusi dalam pembentukan peradaban dunia.

Semangat inklusivitas dan penghormatan terhadap kontribusi berbagai komunitas yang menjadi landasan penting nilai humanisme tercermin dari kebijakan khalifah al-Ma'mun yang memberikan upah tinggi kepada penerjemah non-Muslim seperti yang sudah disampaikan di atas.

Dalam konteks modern, warisan humanisme dari peradaban Bani Abbasiyah memberikan pelajaran berharga, bahwa keterbukaan, kolaborasi, dan penghormatan terhadap keberagaman adalah pilar penting untuk membangun peradaban yang maju dan bermartabat.

3. Ekonomi

Sumber pendapatan utama Bani Abbasiyah diambil dari pemungutan pajak dan zakat yang diwajibkan bagi setiap umat Muslim. Zakat hanya dibebankan pada pemilik tanah produktif, hewan-hewan ternak, logam mulia, emas dan perak, barang-barang dagangan dan harta benda lainnya yang bisa berkembang dan menghasilkan. Semua harta yang terkumpul dari umat Islam akan dibagikan oleh kantor perbendaharaan pemerintah untuk kepentingan dan kesejahteraan umat Islam sendiri yaitu digunakan untuk orang miskin, anak yatim, musafir, orang yang ikut dalam perang suci, para budak, dan untuk tawanan yang ditebus dari musuh.

Sumber pendapatan pemerintah lainnya yaitu pajak atau upeti dari bangsa lain, uang tebusan, pajak untuk perlindungan, rakyat non Muslim (*jizyah*), pajak tanah (*kharaj*), dan pajak yang dikumpulkan dari barang dagangan orang non Muslim yang masuk ke wilayah Islam. Seluruh pemasukan disebut *fa'i* dan disalurkan oleh khalifah untuk gaji tentara, pemeliharaan mesjid, jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur, dan untuk kepentingan umum masyarakat Islam (Daulay et al., 2021).

Sistem ekonomi Bani Abbasiyah ini menunjukkan nilai interaksi multikultural yang tinggi, terutama melalui mekanisme pengelolaan pajak dan zakat. Dalam struktur pendapatan mereka, tidak hanya umat Muslim yang memberikan kontribusi melalui zakat, tetapi juga masyarakat non-Muslim dikenakan pajak jizyah atau pajak perdagangan. Sistem ini mencerminkan hubungan timbal balik antara komunitas Muslim dan non-Muslim dalam masyarakat yang pluralistik, di mana kontribusi dari berbagai kelompok menjadi bagian penting dari stabilitas ekonomi negara. Pajak dari bangsa lain dan uang tebusan menunjukkan adanya keterlibatan Bani Abbasiyah dalam hubungan diplomatik dan ekonomi internasional yang kompleks, yang melibatkan berbagai bangsa dan budaya.

Nilai humanisme dalam sistem ini tercermin dari distribusi hasil pendapatan terutama zakat yang difokuskan untuk mendukung kelompok-kelompok rentan seperti orang fakir dan miskin, anak yatim, musafir dan tawanan perang. Pembebasan budak dan penebusan tawanan dari musuh adalah wujud nyata dari perhatian terhadap hak asasi manusia, menunjukkan kepedulian terhadap martabat manusia tanpa memandang

latar belakang sosial yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama.

Selain itu penggunaan pendapatan negara untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan dan masjid juga menunjukkan upaya menciptakan kesejahteraan kolektif yang inklusif. Hal ini tidak hanya memperkuat konektivitas antarwilayah tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, baik Muslim maupun non-Muslim. Dengan demikian, pemerintahan Bani Abbasiyah tidak hanya membangun sistem ekonomi yang tangguh tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung keharmonisan multikultural dan kemanusiaan.

Sistem ini menggambarkan bagaimana sebuah pemerintahan dapat mengintegrasikan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan toleransi dalam kerangka multikultural. Meskipun ada perbedaan kepercayaan dan kewajiban antara Muslim dan non-Muslim, mekanisme ini dirancang untuk memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, menciptakan harmoni sosial yang menjadi fondasi utama peradaban Islam pada masa itu.

4. Politik

Luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah yang mencapai Persia, Afganistan, sebagian India, Turkistan, Balukhistan, sebagian Romawi timur, Spanyol dan lain-lain, mengharuskan para pemimpin pada masa itu membentuk elite politik untuk membantu mengawasi, menjaga dan mempertahankan wilayah.

Pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, umat Islam mulai mengadopsi konsep universalitas dimana dominasi kasta Arab secara perlahan ditinggalkan dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan. Terbentuk pula ikatan budaya yang menciptakan budaya Timur Tengah yang kosmopolitan. Dinasti Abbasiyah juga terus berupaya untuk membantu raja-raja Abbasiyah pertama dalam menciptakan sistem yang memungkinkan terciptanya perdamaian dan keharmonisan diantara masyarakat selama lebih dari lima abad, sekaligus mempraktikkan cita-cita demokratis tentang kesetaraan dan persaudaraan manusia. (Maulidyfil'ard R, et. al, 2023). Sejalan dengan agenda politiknya, Dinasti Abbasiyah memperkuat diri dengan merangkul dan memberikan peluang serta kesempatan kepada kelompok mawali (non-Arab) untuk menduduki jabatan seperti menteri, gubernur, komandan, dan anggota staf lainnya. Namun, untuk jabatan khalifah tetap diambil dari bangsa Arab. Kebebasan berpikir dan berpendapat juga sangat dijunjung tinggi pada masa itu. Hal ini menyebabkan Baghdad ditetapkan sebagai ibukota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan budaya. (Daulay, et. al, 2021).

Pada aspek ini salah satu ciri utama nilai dan interaksi multikulturalisme dalam pemerintahan Bani Abbasiyah adalah penerapan konsep universalitas, di mana dominasi kasta Arab dalam sistem pemerintahan secara perlahan ditinggalkan. Para pemimpin Bani Abbasiyah memberikan ruang kepada kelompok non-Arab (mawali)

untuk memainkan peran penting dalam politik dan administrasi dengan mengangkat mereka sebagai menteri, gubernur, dan pejabat tinggi lainnya. Langkah ini mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman etnis dan kemampuan individu, terlepas dari asal-usul mereka.

Selain itu, budaya kosmopolitan yang berkembang di wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah menunjukkan bagaimana interaksi antarbudaya dapat menciptakan harmoni. Di bawah Bani Abbasiyah, terjadi integrasi budaya Arab, Persia, Yunani, India dan wilayah lainnya yang menghasilkan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan filsafat. Kota Baghdad, sebagai pusat kekhalifahan menjadi simbol keberagaman dan keterbukaan dimana para pemikir dari berbagai latar belakang bertemu dan bertukar gagasan.

Daulah Bani Abbasiyah juga menunjukkan komitmen pada nilai-nilai humanisme melalui penerapan prinsip kesetaraan dan persaudaraan manusia. Meskipun jabatan khalifah tetap menjadi hak eksklusif bangsa Arab, upaya memberikan kesempatan kepada kelompok Mawali untuk berkontribusi dalam pemerintahan adalah langkah maju dalam menciptakan keadilan sosial. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia dan pengakuan atas potensi setiap individu, terlepas dari asal etnisnya.

Upaya Bani Abbasiyah dalam menciptakan perdamaian dan keharmonisan di wilayah yang luas dan beragam ini menjadi bukti bahwa nilai dan/atau interaksi multikulturalisme dan humanisme dapat berjalan berdampingan. Pengakuan atas keberagaman budaya, etnis dan agama serta penerapan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadikan Daulah Bani Abbasiyah sebagai model pemerintahan yang inklusif.

5. Militer

Dinasti Abbasiyah sangat mengandalkan kekuatan militer dalam menjalankan pemerintahannya. Tampaknya kekuatan militer diperlukan agar absolutisme politik berfungsi sebagai landasan otoritas. Angkatan bersenjata Abbasiyah juga sangat mahir dan terampil, terutama dalam bertanggung jawab mempertahankan wilayah kekuasaan dinasti melalui berbagai manuver pertahanan karena ekspansi teritorial pada saat itu telah terhenti.

Al-Mu'tashim memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan, keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional.). Agar semua kebijakan militer terkoordinasi dan berjalan dengan baik, maka pemerintah Dinasti Abbasiyah membentuk departemen pertahanan dan keamanan, yang disebut *Diwanul Jundi*. (Sewang, 2017).

Dinasti Bani Abbasiyah berhasil menciptakan harmoni antara nilai multikulturalisme dan humanisme melalui kebijakan militernya. Keberagaman dalam

struktur militer ini memungkinkan pemerintahan Abbasiyah untuk memanfaatkan kekuatan dari berbagai kelompok etnis, sementara pendekatan humanis dalam pembinaan prajurit menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya memberikan stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga mencerminkan visi pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada pengembangan potensi individu. Dengan mengintegrasikan berbagai kelompok dalam struktur militer dan membina mereka secara profesional, Bani Abbasiyah memberikan teladan tentang bagaimana keberagaman dapat diolah menjadi kekuatan bersama untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan.

6. Sosial

Keberagaman budaya, etnis, dan agama yang ada di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah diakomodasi dengan sangat baik oleh para khalifah. Salah satu langkah besar yang diambil adalah kebijakan untuk menyamakan hak-hak masyarakat non-Arab dengan masyarakat Arab yang sebelumnya (Daulah Bani Umayyah) lebih dominan dalam pemerintahan dan kehidupan sosial. Hal ini di jelaskan oleh pernyataan Nurtanti (2023), bahwa para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pada masa kekuasaan Abbasiyah ini, hak-hak masyarakat non-Arab disamaratakan. Bahkan dalam beberapa periode mereka memiliki peran yang cukup penting dalam pemerintahan. Beberapa yang tercatat bergabung dalam pemerintahan yaitu kaum Barmak, Dinasti Buwaihi dan Dinasti Saljuk.

Kesetaraan yang dibuat ini tidak hanya menciptakan rasa keadilan saja, tetapi juga membuka peluang bagi berbagai kelompok untuk berkontribusi dalam pemerintahan dan pembangunan peradaban Islam.

Apa yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah adalah contoh nyata dari bagaimana keberagaman dapat dikelola melalui interaksi multicultural dan nilai-nilai humanisme. Dengan menyamakan hak-hak masyarakat non-Arab dan melibatkan mereka dalam pemerintahan, Daulah ini berhasil menciptakan harmoni sosial yang menjadi fondasi stabilitas politik dan kemajuan peradaban Islam. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat pemerintahan saja, tetapi juga meninggalkan warisan yang penting tentang pentingnya menghormati keberagaman dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

I'tibar Dari Masa Lalu Untuk Masa Kini

Sejarah memberikan pelajaran yang tidak ternilai bagi umat manusia. Salah satu era yang menawarkan I'tibar atau hikmah berharga adalah masa Kekhalifahan Bani Abbasiyah (750-1258 M), sebuah periode yang mencerminkan kemajuan intelektual, keterbukaan budaya, dan humanisme. Dalam kajian historis, interaksi multicultural yang terjadi pada era ini menjadi cerminan nilai-nilai kemanusiaan yang relevan untuk dijadikan inspirasi dalam kehidupan modern. Interaksi multikultural yang terjadi tidak

hanya menciptakan harmoni sosial, tetapi juga memunculkan inovasi yang luar biasa dalam berbagai bidang.

Sejarah interaksi multikultural di era Kekhalifahan Bani Abbasiyah memberikan banyak pelajaran yang relevan bagi dunia modern, terutama dalam menghadapi tantangan global yang kompleks. Adapun I'tibar yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut :

1. Pentingnya toleransi dan kerja sama. Di era globalisasi saat ini interaksi multikultural menjadi keniscayaan. Toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan dan keberagaman seperti yang ditunjukkan pada masa Bani Abbasiyah adalah fondasi penting untuk menciptakan harmoni sosial dan mendorong inovasi lintas budaya.
2. Ilmu pengetahuan sebagai warisan universal. Masa Kekhalifahan Bani Abbasiyah menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bukanlah hanya milik satu bangsa atau kelompok tertentu. Melainkan warisan universal yang harus dijaga dan dikembangkan bersama. Ini relevan dalam konteks modern, di mana kolaborasi internasional sangat penting dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, krisis kesehatan, ketimpangan sosial dan hal lainnya.
3. Keterbukaan terhadap keberagaman. Asimilasi budaya dan integrasi berbagai tradisi intelektual di era Bani Abbasiyah menjadi contoh bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Pelajaran ini penting untuk di implementasikan dalam membangun masyarakat inklusif yang menghargai kontribusi setiap individu tanpa memandang latar belakangnya.

Keberhasilan Bani Abbasiyah dalam mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat tanpa meminggirkan identitas budaya masing-masing adalah contoh relevan bagi dunia modern yang juga menghadapi tantangan pluralisme. Dengan demikian, nilai interaksi multikultural dan humanisme pada masa Bani Abbasiyah ini juga memberikan landasan moral dan praktis bagi dunia modern untuk mengelola keberagaman dalam rangka mewujudkan perdamaian dan kemajuan bersama.

Selain itu, masa lalu (Bani Abbasiyah) mengajarkan bahwa keterbukaan, toleransi, dan kerja sama lintas budaya dan etnis adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dengan memahami dan menerapkan I'tibar dari sejarah ini kita dapat membangun masa depan yang lebih inklusif, harmonis dan berkeadaban.

KESIMPULAN

Kajian historis mengenai interaksi multikultural di era kekhalifahan Bani Abbasiyah menunjukkan bahwa masa ini menjadi salah satu tonggak penting dalam peradaban manusia yang menonjolkan nilai-nilai humanisme. Interaksi yang terjalin antara berbagai kelompok etnis, budaya dan agama melahirkan sinergi yang memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan, seni, budaya dan lain sebagainya. Para

khalifah Abbasiyah, melalui kebijakan inklusif dan dukungan terhadap para ilmuwan dan cendekiawan dari berbagai latar belakang berhasil menciptakan atmosfer harmonis yang menjadi contoh ideal dalam penerapan prinsip multikulturalisme.

Sebagai bentuk nyata dari humanisme, upaya ini tidak hanya mendorong kemajuan intelektual, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang menghormati keberagaman. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi dunia modern untuk melihat bagaimana toleransi dan kerjasama lintas budaya dapat membawa dampak positif yang besar bagi peradaban manusia. Kajian ini menggarisbawahi pentingnya meneladani semangat inklusivitas dan keterbukaan yang telah menjadi bagian integral dari sejarah Bani Abbasiyah dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan.

Melalui kajian ini, dapat disimpulkan bahwa interaksi multikultural dan nilai-nilai humanisme pada era Bani Abbasiyah yang berkembang merupakan cerminan nyata dari ajaran keislaman yang menjunjung tinggi toleransi, penghormatan terhadap keragaman dan kemanusiaan. Era ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diimplementasikan dalam tatanan masyarakat yang heterogen dapat menciptakan harmoni di tengah perbedaan budaya, agama dan tradisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin. *Analisis Nilai-Nilai Humanisme Dalam Islam: Study Al-qur'an dan Ilmu Pengetahuan*. EduProf. Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Aziz, Mursal & Siti Fatimah. 2018. *Sejarah Peradaban Islam (Mengambil I'tibar Pembelajaran dari Sejarah dalam Mengembangkan Potensi Pendidikan yang Berkualitas*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Daulay, Haidar Putra, dkk. *Masa Keemasan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah*. Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM), Volume 1, Nomor 2, 2020.
- Daulay, Haidar Putra, dkk. *Peradaban dan Pemikiran Islam Pada Masa Bani Abbasiyah*. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 2, 2021.
- Fransisca, Malia, dkk. *Akulturasi Budaya Pada Masa Umayyah dan Abbasiyah: Analisis Karya Dudung Abdurrahman*. An-Nas: Jurnal Humaniora, Volume 8, Nomor 2, 2024.
- Hasan, Tarikuddin bin Haji. 2012. *Pemerintahan Kerajaan Bani Abbasiyah (132-656 H = 749-1258 M)*. Malaysia: Penerbit Jahabersa.
- Hasanah, Uswatun & Heni Verawati. *Pendidikan Islam Multikultural: Analisis Historis Masa Dinasti Abbasiyah*. ASANKA: Journal of Social Science and Education. Volume 3, Nomor 2, 2022.
- Irfan. *Peran Baitul Hikmah Dalam Menghantarkan Kejayaan Daulah Abbasiyah*. Jurnal as-Salam. Volume 1, Nomor 2, 2016.

- Kodir, Abdul. 2014. *Sejarah Pendidikan Islam, Dari Masa Rasulullah Hingga Reformasi di Indonesia*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Maulidyfil'ard R, Izjtihad Anisa, dkk. *Menilik Jejak Dinasti Abbasiyah dalam Perspektif Sejarah, Periodisasi, dan Sistem Pemerintahan yang Mewarnai Peradaban Islam*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Volume 1, Nomor 12. 2023.
- Nasution, Syamruddin. 2013. *Sejarah Peradaban Islam*. Riau: Yayasan Pusaka Riau.
- Nurtanti, Azizah. *Masa The Golden Age dan Kemunduran Dinasti Abbasiyah*. JHCJ: Jambura History and Culture Journal, Volume 5, issue 2, 2023.
- Saifuddin, dkk. *Ayat Multikultural Dalam Al-qur'an*. Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman. Volume 4, Nomor 1, 2021.
- Saufi, Ahkmad & Hasmi Fadiillah. 2015. *Sejarah Peradaban Islam*. Banjarmasin: Deepublish.
- Sewang, Anwar. 2017. *Buku Ajar Sejarah Peradaban Islam*. Sulawesi : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare.
- Sumanti, Solihah Titin. 2024. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Kencana.
- Suparno, Paul. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan IPA*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Zahdi, Ahmad. 2018. *Sejarah Peradaban Islam (Islam, Sains, dan Peradaban)*. Mataram: Penerbit Sanabil.